

# PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS

(Studi Kasus di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang)

## SKRIPSI

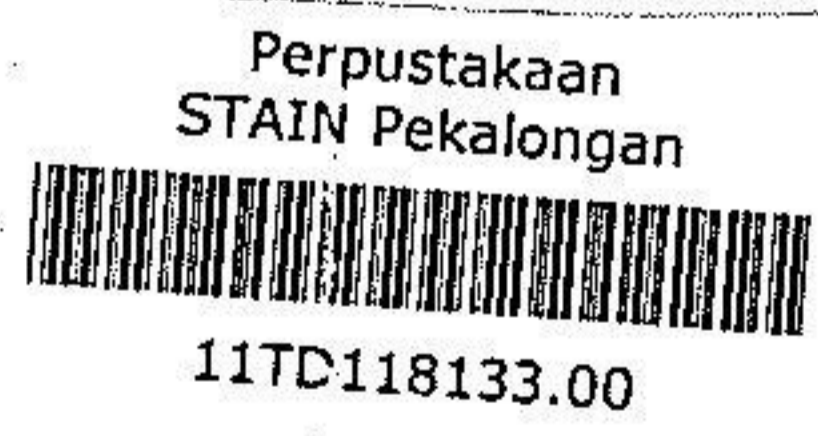
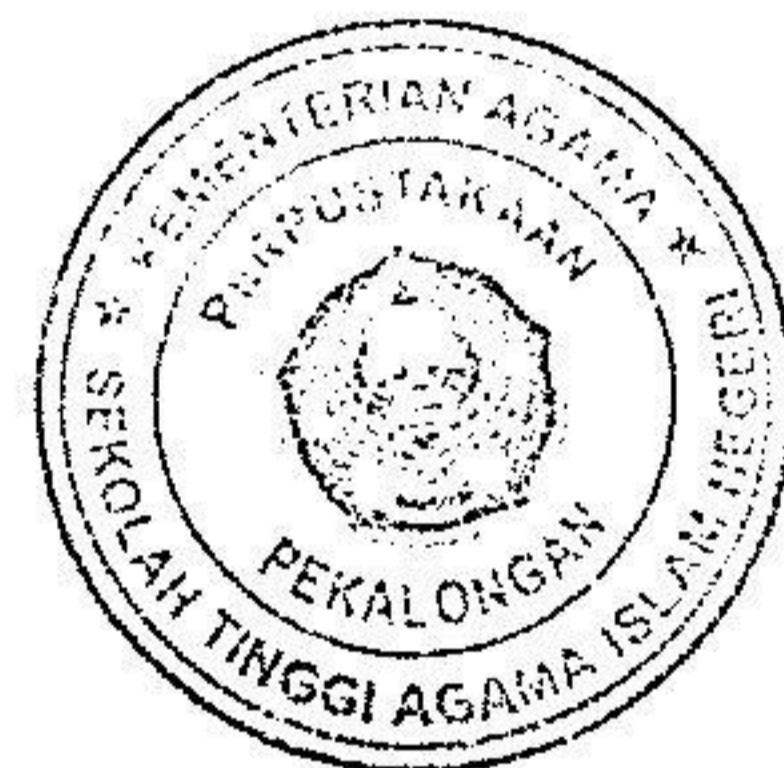
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S.1)  
Dalam Ilmu Tarbiyah



AJAL BUKU INI :	Penulis
NO. INDIKSI :	118133
NO. INDIKSI :	3701 PAR - P
NO. INDIKSI :	118133

Disusun Oleh :

**TARUCHIN**  
232 06 222



**JURUSAN TARBIYAH**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**( STAIN ) PEKALONGAN**

2010

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taruchin

NIM : 232 06 222

Jurusan : Tarbiyah

Program Studi : Pendidikan Agama Islam (PAI)

Angkatan : 2006

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS (STUDI KASUS DI DESA TUMBREP KEC. BANDAR KAB. BATANG)” adalah benar – benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar – benarnya dan apabila tidak benar kami bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Oktober 2010

Yang menyatakan



TARUCHIN  
NIM. 232 06 222

Imam Suradji, M. Ag  
Tirto Gg. 16 No. 574  
Pekalongan

Masykur, M. Ag  
Keputon RT. 02 RW. II  
Blado - Batang

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 3 (tiga) Exp  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. TARUCHIN

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Pekalongan  
c/q. Ketua Jurusan Tarbiyah  
di-  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : TARUCHIN  
NIM : 232 06 222  
Judul : PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP  
PENDIDIKAN GRATIS (Studi Kasus Di Desa  
Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

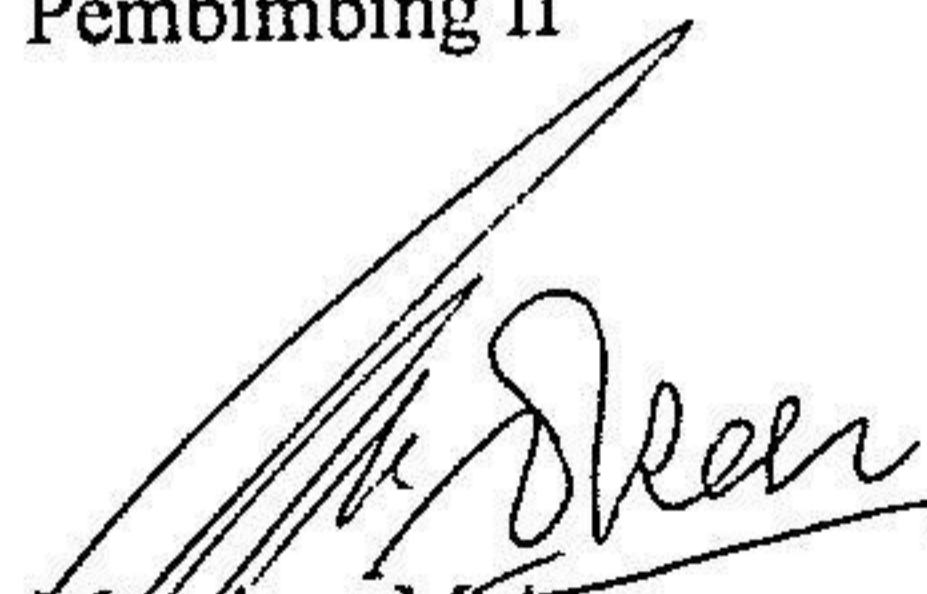
*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I



Imam Suradji, M. Ag  
NIP. 1955 07 04 1981 03 1006

Pembimbing II



Masykur, M. Ag  
NIP. 1973 06 11 2003 12 1001

**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575-412572 Pekalongan  
Fax 423418 Email: stain\_pkl@telkom.net@hotmail.com

**PENGESAHAN**

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : TARUCHIN  
NIM : 232 06 222  
Judul Skripsi : PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP  
PENDIDIKAN GRATIS (Studi Kasus di Desa Tumbrep  
Kec. Bandar Kab. Batang)

Yang telah diujikan pada hari Sabtu tanggal 20 September 2010 dan dinyatakan berhasil serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Tarbiyah.

**Dra. Hj. Fatikhah M. Ag**  
Ketua

**Tri Astutik Haryati M. Ag**  
Anggota

Pekalongan, Nopember 2010



**Dr. Ade Dedi Rahayana, M. Ag**  
NIP. 1971-01-15 1998 03 1 005



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan ibu tercinta, yang telah memberikan banyak kasih dan sayang serta dengan penuh keikhlasan mengasuh, mendidik dan senantiasa mendoakan anaknya tanpa henti demi kesuksesan putra-putri tercintanya.
2. Kakak beserta adikku yang selalu memberi perhatian, dukungan serta tak lupa memotivasiku guna mencapai kesuksesan.
3. Sahabat-sahabatku yang telah banyak membantu dan selalu memberi dorongan disaat kumerasa lemah.
4. Dan teman-teman E'Class'06 yang solid dan selalu kompak.

## MOTO

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ

حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿٢٠١﴾

Artinya: "Dan diantara mereka ada yang berkata: "ya Tuhan kami berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa neraka". (QS. Al-Baqarah: 201)

## ABSTRAK

Taruchin. 2010. "Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Pendidikan Gratis (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang). Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Jurusan Tarbiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pekalongan, Pembimbing I Drs. H. Imam Suraji, M. Ag; Pembimbing II Masykur, M. Ag.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru melalui menteri Pendidikan Nasional dengan mencanangkan program pendidikan gratis wajib belajar 9 tahun. Program pendidikan gratis ini berhasil membentuk opini publik yang kemudian menimbulkan anggapan bahwa para orang tua tidak perlu mengalokasikan dana pendidikan. Menguatnya opini masyarakat tentang konsep pendidikan gratis adalah gratis tanpa mengeluarkan biaya pendidikan sedikitpun ini menimbulkan perdebatan diantara pelaku pendidikan maupun pengamat pendidikan, terlebih masyarakat miskin yang terlanjur menganggap pendidikan telah gratis. Namun di beberapa sekolah masih memungut biaya, sehingga masyarakat menjadi bingung dengan program pendidikan gratis tersebut. Gratis yang dimaksud gratis seperti apa dan bagaimana masih menimbulkan pertanyaan. Dan hal ini memunculkan persepsi bermacam-macam tentang bagaimana konsep sebenarnya dari program pendidikan gratis.

Dari uraian tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan, yaitu: (1) bagaimana konsep pendidikan gratis; (2) bagaimana persepsi masyarakat miskin terhadap biaya pendidikan setelah adanya program pendidikan gratis di desa Tumbrep. Dan penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui konsep pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah; (2) Ingin mengetahui persepsi masyarakat miskin terhadap biaya pendidikan setelah adanya program pendidikan gratis di desa Tumbrep.

Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan, dengan wujud data dari pendapat atau pemikiran tokoh pada hasil penelitian yang relevan. Dengan sumber data primer yaitu masyarakat miskin desa Tumbrep serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen dan arsip. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, interview dan dokumentasi dengan menggunakan analisis data deskriptif analitis.

Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat miskin desa Tumbrep terhadap pendidikan gratis ada yang apresiatif terhadap pendidikan gratis dan ada yang apatis. Bagi mereka yang apresiatif dikarenakan mereka mempunyai anak usia sekolah lebih dari satu dan yang sekolah di tingkat menengah pertama dibebaskan dari biaya SPP atau ada yang mendapat beasiswa tidak mampu. Sementara bagi mereka yang apatis memang sudah tidak peduli akan kesadaran pendidikan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesejahteraan mereka sangat minim dan menurut mereka biaya pendidikan masih terbilang mahal.

**Kata kunci:** *masyarakat miskin, dan pendidikan gratis.*

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT., yang telah memberi kenikmatan, kerahmatan, hidayah, dan inayah, serta petunjuknya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS** (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang).

Tak lupa shalawat dan salamnya kita limpahkan kepada Sayyidina Muhammad SAW, yang telah membawa kita pada zaman penuh kecerdasan ilmu pengetahuan.

Penulis sadar dengan segala keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun demikian, penulis sudah berusaha semaksimal mungkin mencari beberapa sumber untuk melengkapi skripsi ini agar tersusun dengan baik.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat banyak bimbingan, bantuan dan dorongan baik yang berupa materiil maupun spiritual, maka dalam kesempatan ini penulis sampaikan terimakasih kepada yang terhormat

1. Bapak Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Bapak Drs. Moh. Muslih, M.Pd selaku Ketua Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan
3. Bapak M. Sugeng Sholehuddin M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Tarbiyah STAIN Pekalongan





4. Bapak Abdul Khobir, M.Ag selaku Ketua Prodi. Pendidikan Agama Islam

STAIN Pekalongan

5. Bapak Drs. H. Imam Suraji, M. Ag selaku Pembimbing I

6. Bapak Masykur, M. Ag selaku Pembimbing II

7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta segenap civitas akademika STAIN Pekalongan atas pelayanannya selama ini

8. Kedua orang tua Ananda yang telah memberikan bimbingan dan kasih sayang dengan penuh ikhlas

9. Bapak Lurah Desa Tumbrep dan Seluruh Staf-stafnya

10. Seluruh masyarakat desa Tumbrep yang telah ikut berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Anggota kelas E '06, Teman-teman PPL dan KKN yang telah berbagi pengalaman.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi pembaca. Amin.

Pekalongan, Nopember 2010

Penulis

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan.....	19
<b>BAB II MASYARAKAT MISKIN DAN KONSEP PENDIDIKAN GRATIS</b>	
A. Masyarakat Miskin	
1. Pengertian Masyarakat .....	21
2. Pengertian Masyarakat Miskin.....	26
3. Dimensi Kemiskinan .....	28
4. Jenis-jenis Kemiskinan.....	34
5. Faktor Penyebab Timbulnya Kemiskinan.....	37
6. Upaya Penanggulangan Kemiskinan.....	40
B. Konsep Pendidikan Gratis	
1. Pengertian Pendidikan Gratis .....	46

2. Latar Belakang Pendidikan Gratis.....	49
3. Tujuan Pendidikan Gratis.....	53
4. Pembiayaan Pendidikan Gratis.....	57
5. Dampak Dari Kebijakan Pendidikan Gratis.....	63

### **BAB III PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS**

#### **A. Gambaran Umum Kondisi Desa Tumbrep**

1. Letak Geografis.....	74
2. Monografi dan Demografi Desa.....	74
3. Kondisi Sosial Desa Tumbrep .....	76

#### **B. Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Biaya Pendidikan Setelah**

Adanya Pendidikan Gratis .....	78
--------------------------------	----

### **BAB IV ANALISIS PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS.....**

A. Analisis Konsep Pendidikan Gratis.....	84
B. Analisis Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Biaya Pendidikan Setelah Adanya Program Pendidikan Gratis.....	85

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	90
B. Saran .....	91

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **SURAT IJIN PENELITIAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## DAFTAR TABEL

Tabel I	: Klasifikasi Tingkat Kemiskinan .....	33
Tabel II	: Data Mata Pencaharian Penduduk Desa Tumbrep .....	75
Tabel III	: Daftar Nama Perangkat Desa Tumbrep .....	76

## BAB I PENDAHULUAN

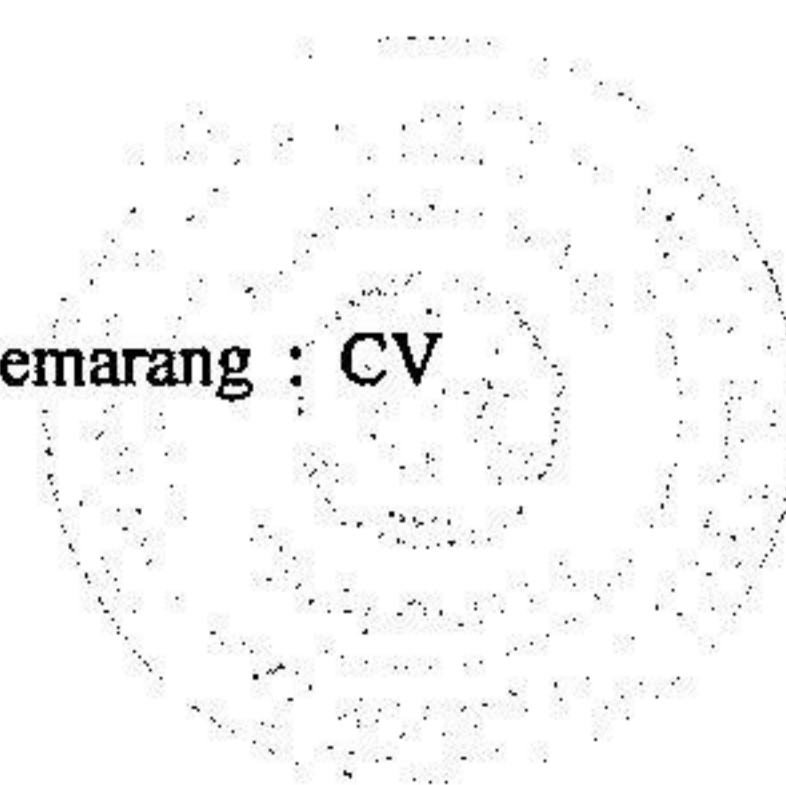
### A. LATAR BELAKANG MASALAH

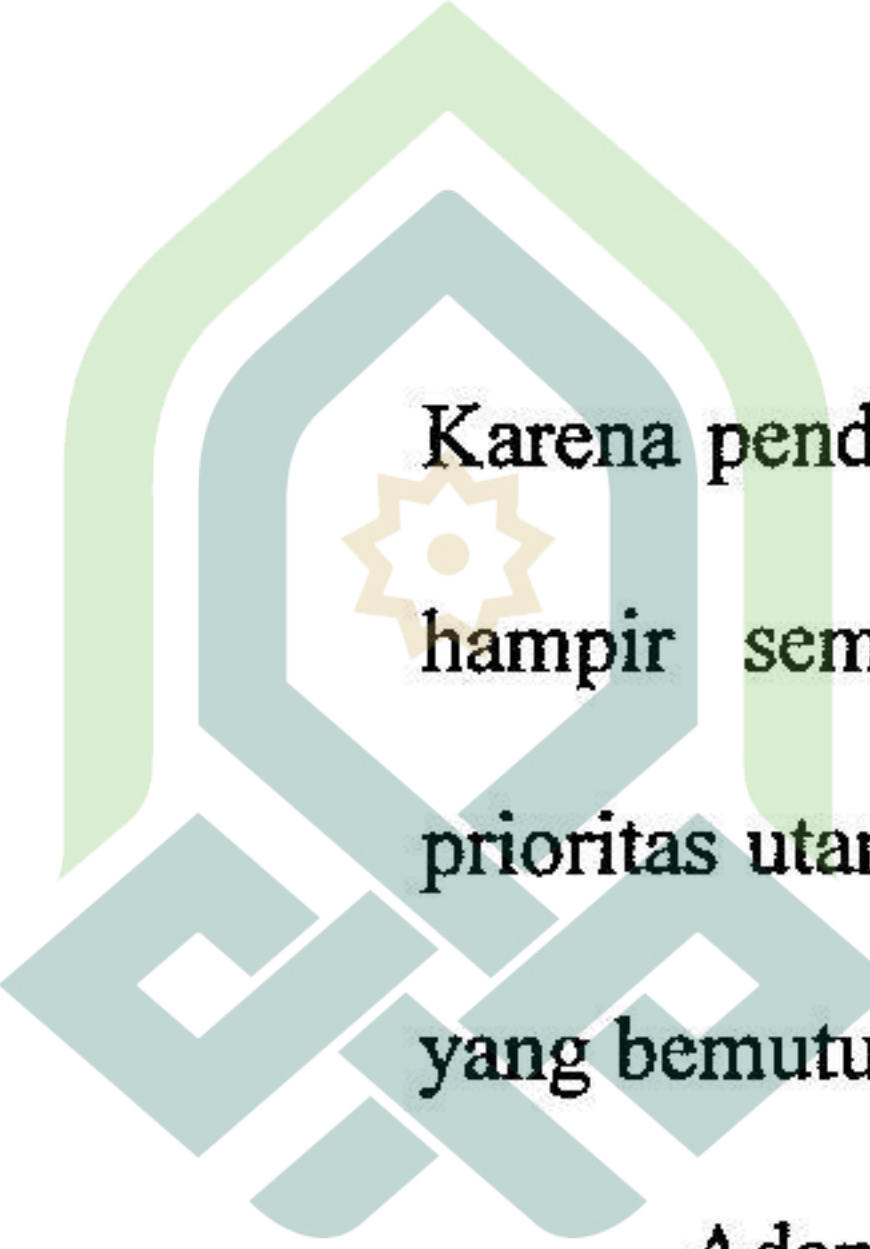
Dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup> Berdasarkan definisi ini maka terdapat beberapa kecakapan hidup yang diharapkan dapat dimiliki oleh peserta didik setelah menempuh suatu proses pendidikan.

Pendidikan merupakan kebutuhan primer dan mempunyai peran yang sangat strategis bagi manusia dalam mempertahankan kehidupannya, hanya manusia berpendidikanlah yang mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai bentuk perubahan yang senantiasa terjadi setiap saat. Oleh sebab itu, jika terjadi penekanan terhadap kebutuhan pendidikan, maka sendi-sendi kehidupan umat manusia secara global akan mengalami percepatan yang secara pasti berpengaruh pula terhadap kebutuhan manusia yang lainnya.

---

<sup>1</sup> UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, (Semarang : CV Aneka Ilmu, 2003), h. 7






Karena pendidikan merupakan satu aspek penting bagi pembangunan bangsa, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang bermutu yang merupakan kunci keberhasilan pembangunan suatu negara.

Adapun pemikiran tentang reformasi pendidikan didasarkan pada penilaian atas kegagalan pendidikan nasional pada masa Orde Baru. Upaya Orde Baru meningkatkan kualitas dan efektivitas pendidikan terus dilandasi niat baik dan membawa hasil yang spektakuler jika dibanding Orde sebelumnya, tetapi kita tidak bisa mendasarkan pada maksud baik semata.

Catatan tentang kegagalan yang mengecewakan perlu diungkap yang meliputi : 1) Kegagalan memberikan pendidikan secara merata kepada anak usia sekolah, yang dikenal dengan wajib belajar (wajib 9 tahun); 2) Kegagalan hasil pendidikan membangun kepribadian yang mantap dan bertanggung jawab pada masyarakat dan bangsa, karena tidak mampu memecahkan masalah, lemah berkomunikasi dan dalam bekerja sama; 3) Konflik yang tidak terselesaikan tentang kurikulum sebagai alat perubahan; 4) Keterbatasan jumlah anggaran pendidikan dalam APBN; 5) Politisasi lembaga pendidikan dikaitkan dengan pemeliharaan dukungan terhadap rezim Orde Baru oleh birokrasi pendidikan, dan sebagainya.

Reformasi pendidikan sebagai kesempatan yang terbuka setelah tumbang rezim Orde Baru dan berfokus pada: 1) Usaha-usaha untuk meningkatkan anggaran Pendidikan dalam APBN 2001; 2) Perubahan jumlah mata pelajaran di SD, SMP, dan SMA; 3) Perubahan paradigma pendidikan



dari mengajar ke belajar; 4) Perubahan atau perumusan falsafah pendidikan dalam cara pandang atau memposisikan murid sebagai warga belajar yang bermartabat; dan 5) Perubahan atau perumusan fungsi pendidikan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan warga belajar untuk menghadapi masa depan yang kompleks dan dinamis (berubah).<sup>2</sup>

Perubahan sikap akademisi dan birokrasi yang didukung oleh masyarakat terutama pelaku pendidikan untuk merumuskan gagasan reformasi pendidikan, menyebabkan lahirnya gerak aktif, kreatif, mandiri dan berpikir *problem solving* baik dalam artificial dan konsepsional.


Untuk melakukan reformasi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Sejumlah fakta yang menjadi fokus usaha tersebut harus dilihat kaitan dan pengaruhnya pada perilaku kelembagaan, mulai dari manajemen, subyek pendidikan ( baik pendidik maupun peserta didik ), sarana dan lingkungan pendidikan serta segala sesuatu yang terkait dengan ketatalaksanaan pendidikan, disinilah perlunya anggaran pendidikan yang memadai.

Akibat dari kecilnya anggaran pendidikan salah satu pengaruhnya adalah gagalnya arus murid dalam penyelenggaraan wajib belajar.

Wajib belajar adalah upaya melaksanakan UU pasal 31 bahwa “ tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran “. Dari pasal ini pemerintah memiliki dua mandat dari UUD 1945 yaitu : aspek kualitatif “mencerdaskan bangsa” dan aspek kuantitatif “tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”. Depdiknas sebagai aktor utama dalam pelaksanaan pendidikan,

---

<sup>2</sup> Utomo Dananjaya, *Sekolah Gratis*, (Jakarta : Paramdina, 2005), h. 189



dianggap berhasil apabila 29 juta anak mendapat pendidikan SLTP. Tetapi angka BPS 2005 menunjukkan bahwa 15 juta anak usia sekolah *drop-out* pada jenjang SD kelas 3, dan 7 juta *drop-out* SD kelas 4-6.<sup>3</sup> Penyebabnya adalah kemiskinan sebagai akibat dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, sehingga mereka lebih memilih putus sekolah guna membantu ekonomi orang tua.

Disamping itu persoalan lain yang menonjol dalam pendidikan nasional kita meliputi ; masih rendahnya kesempatan memperoleh pendidikan, rendahnya kualitas dan relevansi pendidikan serta lemahnya manajemen pendidikan.

Selain dari pada itu belum terwujudnya kemandirian dan keunggulan ilmu pengetahuan dan teknologi di kalangan akademis, ketimpangan pemerataan pendidikan juga terjadi antar wilayah geografis, yaitu antara perkotaan dan pedesaan, serta antara kawasan timur dan kawasan barat Indonesia, dan antar tingkat pendapatan ataupun antar gender.

Keadaan tersebut tentu mengkhawatirkan untuk masa depan bangsa, pendidikan di Indonesia yang selama ini di cap terlalu mahal dan hanya menguntungkan pihak tertentu saja dan masyarakat yang mampu secara ekonomi, namun sebaliknya menyulitkan masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya hingga mencapai target pemerintah untuk program wajib belajar 9 tahun.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, kemudian pemerintah mengeluarkan

---

<sup>3</sup> Utomo Dananjaya, *Sekolah Gratis*, h. 4



kebijakan baru melalui menteri Pendidikan Nasional dengan mencanangkan program pendidikan gratis wajib belajar 9 tahun.

Program yang disiarkan melalui sejumlah stasiun televisi swasta dan media cetak ini seakan memberi angin segar bagi masyarakat miskin. Bahkan informasi yang ditayangkan hampir sepanjang hari menjelang datangnya tahun ajaran baru 2009/2010 berhasil membentuk opini publik terhadap program pendidikan gratis yang kemudian menimbulkan anggapan bahwa para orang tua tidak perlu bersusah-susah mengalokasikan dana pendidikan untuk membiayai anak-anaknya yang sedang atau akan menjalani pendidikan di bangku SD/MI dan SMP/MTs.

Harapan mereka seakan terpenuhi dengan adanya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sebagai pengganti biaya pendidikan. Dana dari pemerintah pusat yang didistribusikan melalui pemerintah daerah ini tujuannya untuk membantu kegiatan operasional dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Sehingga segala macam bentuk iuran, baik SPP maupun yang lainnya menurut masyarakat sudah ditanggung oleh pemerintah dengan dana penyelenggaraan pendidikan tersebut.

Namun demikian, pembiayaan pendidikan dalam kenyataannya masih banyak yang harus dikeluarkan. Hal ini dirasakan oleh masyarakat desa Tumbrep kecamatan Bandar kabupaten Batang, dimana mereka masih tetap membayar kebutuhan sekolah anaknya meskipun telah diadakan pendidikan gratis. Keadaan tersebut menimbulkan anggapan bermacam-macam dari masyarakat tentang bagaimana konsep sebenarnya dari pendidikan gratis.

Karena mereka masih harus membayar meskipun program pendidikan gratis katanya telah dilaksanakan.

Menguatnya opini masyarakat tentang konsep pendidikan gratis adalah gratis tanpa mengeluarkan biaya pendidikan sedikitpun ini menimbulkan perdebatan diantara pelaku pendidikan maupun pengamat pendidikan, terlebih masyarakat miskin yang terlanjur menganggap pendidikan telah gratis. Namun di beberapa sekolah masih memungut biaya meskipun telah mendapatkan bantuan dana BOS, sehingga masyarakat menjadi bingung dengan program pendidikan gratis yang disiarkan di beberapa media dengan durasi yang sangat singkat tersebut. Adapun gratis yang dimaksud gratis seperti apa dan bagaimana masih menimbulkan pertanyaan, ternyata pendidikan belum gratis sepenuhnya. Dan hal ini memunculkan persepsi bermacam-macam dari publik tentang konsep sebenarnya dari program pendidikan gratis. Sehingga penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang pendidikan gratis sebenarnya dan bagaimana manfaatnya bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Dengan ini penulis memberinya judul **“PERSEPSI MASYARAKAT MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS (Studi Kasus di Desa Tumbrep Kec. Bandar Kab. Batang)”**.

Adapun alasan penulis memilih judul tersebut, yaitu :

1. Perlunya kajian lebih lanjut mengenai konsep pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah.
2. Adanya indikasi yang belum jelas mengenai pendidikan gratis sebenarnya yang dicanangkan pemerintah.

## B. RUMUSAN MASALAH

Dengan judul di atas, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep pendidikan gratis?
2. Bagaimana persepsi masyarakat miskin terhadap biaya pendidikan setelah adanya program pendidikan gratis di desa Tumbrep?

Untuk mencegah terjadi kerancuan dalam pemahaman antara penulis dan pembaca, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan istilah yang terdapat dalam penulisan judul skripsi “Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Pendidikan Gratis”.

### 1. Persepsi

Persepsi adalah tanggapan (penerimaan) atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca indera.<sup>4</sup>

### 2. Masyarakat Miskin

Masyarakat miskin adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kehidupan yang pokok. Mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang paling pokok, seperti pangan, pakaian, tempat berteduh dan lain-lainnya.<sup>5</sup> Yang dimaksud masyarakat miskin dalam penelitian ini adalah masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan Langsung Tunai

<sup>4</sup>Departemen pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 104

<sup>5</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*, (Jakarta : Fajar Agung, 1987), h. 135

(BLT), adapun kriterianya sesuai dengan yang ditetapkan BPS sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang.
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari.
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 0, 5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp 600.000 per bulan.
- m. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000, seperti: sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

### 3. Pendidikan Gratis

Pendidikan gratis adalah penyelenggaraan pendidikan tanpa mengikutsertakan masyarakat (orang tua) dalam pembiayaan, khususnya untuk keperluan operasional sekolah.<sup>7</sup>

Jadi, dari penegasan istilah di atas diperoleh maksud bahwa judul tersebut mengandung suatu pengertian yaitu tanggapan masyarakat miskin

<sup>6</sup> Ahmad Sarwat, *Kriteria Kemiskinan*, di akses 10 Agustus 2010, <http://www.ustsarwat.com/>

<sup>7</sup> Syamsiah Badruddin, : "Menyorot Political Will, Political Commitment Dan Political Action Terhadap Pendidikan gratis Dan Pembatasan Anak Usia Sekolah", Makalah Seminar Nasional Pendidikan Gratis, 19 Maret 2009

yang mendapatkan BLT terhadap biaya pendidikan dengan tanpa mengikutsertakan orang tua dalam pembiayaan yang dicanangkan pemerintah.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Dalam penelitian ini tujuan yang ingin dicapai penulis untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah, yaitu :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan konsep pendidikan gratis yang diselenggarakan oleh pemerintah.
2. Ingin mengetahui dan mendeskripsikan persepsi masyarakat miskin terhadap biaya pendidikan setelah adanya program pendidikan gratis di desa Tumbrep.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah :

1. Dapat menjadi acuan bagi penyelenggara pendidikan dalam memberikan fasilitas pendidikan untuk masyarakat kurang mampu.
2. menjadikan manfaat bagi penulis dan pembaca dalam memperluas wawasan keilmuan.
3. Dapat dijadikan acuan bagi masyarakat untuk memahami konsep pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah.

## E. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Analisis Teori

Program pendidikan gratis pada dasarnya melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 12 ayat 1 poin (d) peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya, pasal 34 ayat (1) setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar, (2) pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, (3) wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah (pusat), pemerintah daerah, dan masyarakat, (4) ketentuan ayat tersebut diatur lebih lanjut oleh PP.<sup>8</sup>

Dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 diuraikan dengan jelas bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat; sedang pada ayat (2) dijelaskan bahwa masyarakat yang dimaksud adalah meliputi (a) penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat, (b) peserta didik, orangtua atau wali peserta didik dan (c) pihak-pihak lain yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Pengertian pada pasal 2 ini merupakan pengaturan lebih lanjut daripada Bab XIII pasal 46 ayat (1) Undang Undang Republik

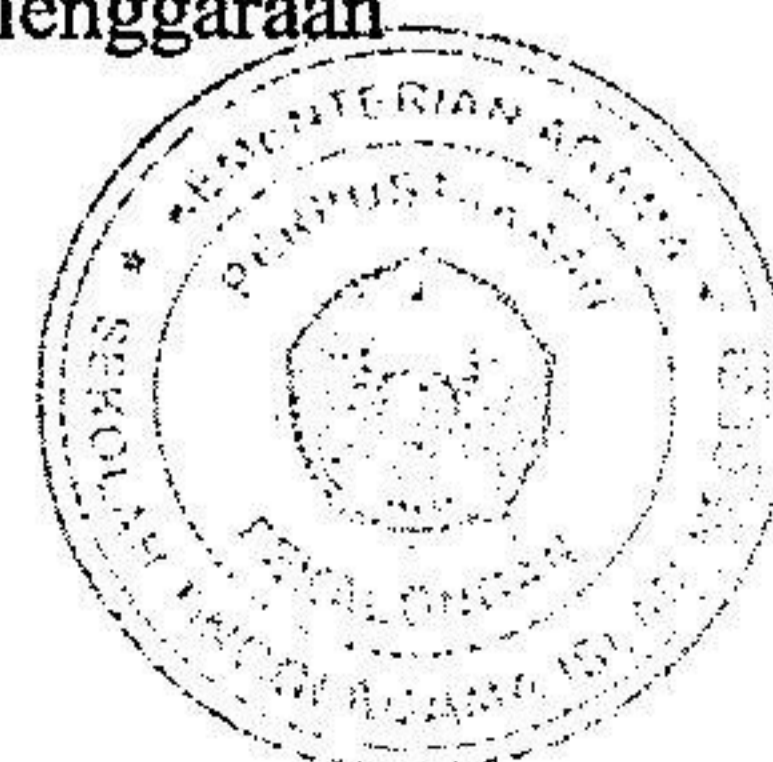
---


<sup>8</sup> Moh. Rosyid, *Ketimpangan Pendidikan*, h. 91-92

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang intinya adalah bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 menguraikan secara terperinci mengenai definisi dan komponen biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah dialokasikan dalam APBN dan yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam APBD sesuai dengan sistem penganggaran dalam peraturan perundang-undangan. Adapun komponen biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik.

Tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam pasal 7 sampai dengan pasal 31 meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan, biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa serta pendanaan pendidikan di luar negeri. Biaya Investasi satuan pendidikan dan biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah akan meliputi biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan. Sedangkan biaya operasi satuan pendidikan dan biaya operasi penyelenggaraan






dan/atau pengelolaan pendidikan yang merupakan tanggung jawab pemerintah akan meliputi biaya personalia dan biaya non-personalia.

Demikian pula dengan bantuan biaya, beasiswa dan pendanaan pendidikan diluar negeri semuanya diatur dengan jelas dalam peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008 dengan disertai dengan ancaman pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab masyarakat dalam pendanaan pendidikan dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan tanggung jawab pendanaan pendidikan oleh masyarakat diluar penyelenggara dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat. Komponen biaya pendidikan pada penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat akan meliputi biaya investasi satuan pendidikan, biaya investasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, biaya operasi satuan pendidikan, biaya operasi penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, bantuan biaya pendidikan dan beasiswa.

Sedangkan tanggung jawab masyarakat diluar penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat atau dengan kata lain tanggung jawab masyarakat selaku orang tua atau wali peserta didik akan meliputi biaya pribadi peserta didik, biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan, biaya personalia yang diperlukan untuk menutupi kekurangan pendanaan dan pendanaan





sebagian dari biaya operasi pendidikan dalam rangka pengembangan sekolah yang biasanya dipungut berdasarkan musyawarah dan mufakat melalui Komite Sekolah.<sup>9</sup>

Pendanaan pendidikan oleh pemerintah diharapkan sebagai sumber pembiayaan pendidikan yang utama, karena pendidikan merupakan proses untuk meningkatkan, memperbaiki, mengubah pengetahuan, keterampilan dan sikap serta tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mencerdaskan kehidupan manusia melalui kegiatan bimbingan pengajaran dan pelatihan. Proses menunjukkan adanya aktivitas dalam bentuk tindakan aktif dimana terjadi suatu interaksi yang dinamis dan dilakukan secara sadar dalam usaha mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena tindakan sadar agar terjadi perubahan sikap dan tata laku yang diharapkan yaitu pemanusiaan manusia yang cerdas, terampil, mandiri, berdisiplin dan berakhlak mulia.<sup>10</sup>

Kata 'gratis' oleh masyarakat awam dipahami dengan anggapan bahwa peserta didik tidak mengeluarkan biaya (*cost*) sedikitpun. Program pendidikan gratis adalah konsekuensi pemerintahan RI pascaratifikasi Ecosol (Dewan Ekonomi dan Sosial) di bawah naungan PBB yang antara lain menyebabkan perlunya pendidikan gratis.<sup>11</sup>


Keadaan sosial masyarakat yang masih banyak berada dibawah garis kemiskinan adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Secara

---

<sup>9</sup> Mencoba Memahami PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Biaya Pendidikan, 8 Maret 2010, <http://mediapendidikan1.blogspot.com/>

<sup>10</sup> M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan*, h. 125

<sup>11</sup> Moh. Rosyid, *Ketimpangan Pendidikan*, (Kudus : STAIN Kudus Presss, 2006), h.89



sosiologis, keadaan sosial masyarakat yang demikian menimbulkan pertanyaan sejauh mana proses pendidikan yang dilakukan selama ini karena pendidikan yang berhasil dapat dicerminkan dari adanya peningkatan taraf hidup masyarakat. Pengelolaan proses pendidikan yang masih terkesan minim tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya dukungan sumber pembiayaan yang memadai dari pemerintah.<sup>12</sup>


Namun demikian beban yang dipikul masyarakat miskin dalam pembiayaan pendidikan semakin tinggi, dapat diperkirakan jumlah orang yang tidak mengikuti pendidikan akan semakin banyak. Faktor tersebut sangat besar pengaruhnya dalam pendidikan dan bukan karena masyarakat tidak ingin belajar, namun karena keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Dampak dari krisis multidimensional menyebabkan banyak orang merasa kewalahan menyekolahkan anaknya. Dana BOS, BOM, dan jenis bantuan lainnya dari pemerintah memang sudah terasa sedikit meringankan namun yang lebih diinginkan adalah pendidikan gratis.<sup>13</sup>

Sejauh penelusuran penulis dari katalog di perpustakaan STAIN Pekalongan, penulis tidak menemukan skripsi yang mengkaji tentang pendidikan gratis. Adapun yang penulis temukan kaitannya dengan pendidikan gratis yaitu hanya skripsi yang mengkaji tentang dana BOS yang dikaji oleh Ahmad Wildan dengan judul “Efektivitas Dana BOS Dalam Memenuhi Pembiayaan Operasional Sekolah di MI Wali Songo

---

<sup>12</sup> M. Zainuddin, *Reformasi Pendidikan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008), h. 132


<sup>13</sup> Moh. Rosyid, *Ketimpangan Pendidikan*,... h.89



Ambokembang 02 Kedungwuni Pekalongan” dan “Efektivitas Dana BOS Terhadap Prestasi Belajar Siswa (Studi Kasus Kelas II MI Salafiyah 02 Simbang Kulon Buaran Pekalongan)” yang dikaji oleh Muthoharoh. Kedua skripsi tersebut lebih menekankan pada pembahasan efektivitas dana BOS yang mana menjawab efektif atau tidaknya dana BOS terhadap pemenuhan pembiayaan operasional sekolah dan prestasinya belajar siswa. Jadi, penulis menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang membahas tentang pendidikan gratis sebelumnya.

## 2. Kerangka Berfikir

Pendidikan merupakan kebutuhan sosial yang wajib dipenuhi, karena hanya dengan pendidikanlah anak bangsa akan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman yang akan semakin mengglobal, SDM yang berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan lahir jika pendidikan dibenahi kearah yang benar dengan menggunakan paradigma pengelolaan pendidikan modern. Krisis moneter dan krisis multidimensional yang terjadi beberapa tahun lalu, telah membawa dampak serius dalam bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. Akibatnya, proses pencerdasan kehidupan bangsa mengalami hambatan yang cukup serius, khususnya upaya untuk mensukseskan wajib belajar 9 tahun yang bertujuan mengentaskan kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan. Oleh sebab itu, amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15



tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, tidak boleh ada *drop out* karena alasan biaya.

Pengelolaan sebesar 20% APBN untuk anggaran pendidikan diharapkan dapat mempercepat realisasi pendidikan gratis. Selain itu, mata rantai birokrasi yang panjang sering kali berkonsekuensi pendanaan yang besar, demikian halnya birokrasi di bidang pendidikan, sehingga demi efisiensi penggunaan dana pendidikan dipandang perlu untuk diperpendek. Pemerintah kiranya dapat menyalurkan biaya operasional yang dapat di akses langsung oleh sekolah ke bank-bank yang di tunjuk sesuai dengan alokasi masing-masing sekolah/madrasah. Dengan demikian segala macam potongan yang selama ini menjadi penyebab anggaran dapat dihindari, dan diharapkan pendidikan dapat di jangkau masyarakat miskin tanpa memikirkan biaya lagi.

Atas dasar pemikiran di atas, maka dirasa sangat perlu untuk mengadakan kajian lebih lanjut dalam rangka mencari dan menemukan jawaban bagaimana pendidikan gratis yang sebenarnya. Kajian tersebut dilakukan dalam bentuk penelitian, yang dalam hal ini mengambil tema pendidikan gratis dengan judul Persepsi Masyarakat Miskin Terhadap Pendidikan Gratis.

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala yang diselidiki.<sup>14</sup> Dan dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah masyarakat miskin desa Tumbrep.

### 2. Wujud Data

Data-data yang penulis gunakan dalam skripsi ini berwujud pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan dari pemikiran seorang tokoh dalam sebuah buku maupun hasil penelitian yang relevan.

### 3. Sumber Data


Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Adapun sumber data dari penelitian ini antara lain :

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Untuk memperoleh data tentang masyarakat miskin desa Tumbrep serta pendidikan di desa

---

<sup>14</sup> James P. Spradley, *Metode Etnografi*, Edisi Terjemahan oleh Misbah Zulfa Elizabeth (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), hlm. VIII



tersebut, adapun sumber data primernya adalah masyarakat miskin setempat, juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia mengenai kebijakan pendidikan gratis.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data dimana data yang dikumpulkan oleh peneliti diperoleh dari sumber pendukung, adapun yang termasuk sumber data sekunder yaitu buku-buku penunjang tentang pelaksanaan pendidikan gratis yang diprogramkan pemerintah. instansi pendidikan terkait guna memperoleh informasi tentang program pendidikan gratis, juga arsip serta dokumen dari kelurahan setempat untuk memperoleh data masyarakat miskin.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu :

a. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup>

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan melakukan proses wawancara mendalam kepada informan yang telah ditentukan untuk menggali informasi yang diperlukan dengan lebih seksama dan komprehensif.

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1997), h.64

### c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data yang berupa dokumen dan data-data yang tertulis.<sup>16</sup>

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang sifatnya dokumentaris yang kaitannya dengan masyarakat miskin serta pelaksanaan pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah.

## 5. Metode Analisis Data

Sehubungan dengan jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yang mana jenis data yang dihasilkan adalah data lunak, yang berupa kata-kata, baik yang diperoleh dengan wawancara, observasi dan analisis dokumen, maka dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif analitis. Dalam menganalisis data penulis menempuh tiga langkah, yaitu reduksi data, display atau sajian data dan verifikasi atau penyimpulan data.


## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis perlu menguraikan beberapa hal yang menyangkut sistematika penulisan yang menggambarkan isi secara singkat, yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 200



Bab II Landasan Teori, pada bab ini lebih banyak memberikan tekanan pada kajian atau landasan teoritis yang menunjang permasalahan yang penulis teliti yang berisikan dua sub bab yaitu : masyarakat miskin yang meliputi masyarakat miskin yang cakupannya meliputi pengertian masyarakat, pengertian masyarakat miskin, dimensi kemiskinan, jenis-jenis kemiskinan, faktor penyebab kemiskinan dan upaya penanggulangan kemiskinan. Dan konsep pendidikan gratis yang meliputi pengertian, latar belakang, tujuan, sumber pembiayaan dan dampak kebijakan dari pendidikan gratis.

Bab III Hasil Penelitian yang meliputi : tinjauan umum kondisi desa Tumbrep yang meliputi letak geografis, monografi dan demografi serta keadaan sosialnya. Dan persepsi masyarakat miskin terhadap biaya pendidikan setelah adanya pendidikan gratis di desa Tumbrep.

Bab IV Analisis Data yaitu menganalisis persepsi masyarakat miskin terhadap pendidikan gratis di desa Tumbrep yang meliputi: analisis konsep pendidikan gratis dan analisis persepsi masyarakat miskin terhadap biaya pendidikan setelah adanya program pendidikan gratis.

Bab V Penutup yang merupakan bab terakhir dari pembahasan yang berisikan kesimpulan dan beberapa saran yang berkaitan dengan realitas hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Masyarakat miskin di desa Tumbrep ada yang apresiatif terhadap pendidikan gratis dan ada pula yang apatis. Bagi mereka yang apresiatif terhadap pendidikan gratis dikarenakan mereka mempunyai anak usia sekolah lebih dari satu. Apabila mempunyai anak yang sekolah di tingkat menengah pertama, siswa dibebaskan dari biaya SPP atau ada yang mendapat beasiswa tidak mampu, sehingga dana yang seharusnya untuk membayar SPP bisa digunakan untuk kebutuhan lain.
2. Sementara bagi mereka yang apatis terhadap program yang dicanangkan pemerintah yaitu pendidikan gratis memang sudah tidak peduli akan kesadaran pendidikan. Hal tersebut dikarenakan tingkat kesejahteraan mereka sangat minim, adapun dalam program pendidikan gratis hanya biaya operasional yang digratiskan, namun biaya personal yang berkaitan dengan kebutuhan pribadi siswa seperti seragam, sepatu, buku tulis dan perlengkapannya masih dibiayai sendiri, terlebih setiap harinya harus memberikan uang saku kepada anaknya. Jadi, menurut mereka biaya pendidikan memang masih terbilang mahal, karena pengeluaran yang dianggarkan untuk pendidikan tidak sedikit.



## B. Saran

### 1. Bagi Masyarakat

Untuk lebih memprioritaskan pendidikan anak-anaknya, karena dengan pendidikan orang dapat mempunyai keahlian dan keterampilan serta mempunyai peluang kerja yang siap guna. Dengan pendidikan pula orang mampu meningkatkan kualitas hidup kedepannya, mampu mengurangi tingkat kebodohan, pengangguran, dan kemiskinan, serta mampu menghasilkan SDM yang berkualitas.

### 2. Bagi Penyelenggara Pendidikan

Hendaknya memberi segala kemudahan dan fasilitas kepada masyarakat miskin untuk bisa mengakses pendidikan dengan mudah dan bisa diringankan biayanya, sehingga masyarakat miskin bisa bernafas lega dalam memikirkan pendidikan anaknya. Adapun dengan program pendidikan gratis harusnya penyelenggara pendidikan benar-benar menggratiskan bagi masyarakat miskin sesuai yang diamanatkan oleh UUD 1945, yang mewajibkan pemerintah bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan kesejahteraan umum. Jadi, semua warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran tanpa terkecuali, baik "yang kaya" maupun "yang miskin" dan masyarakat perkotaan maupun pedesaan (terpencil).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 2007. *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Abu Ahmadi. 1997. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Ahmad Sanusi. 1999. *Agama Di Tengah Kemiskinan*. Jakarta : PT. Logos Wacana Ilmu.
- Ahmad Sarwat. 2010. *Kriteria Kemiskinan*. <http://www.ustsarwat.com/>
- Arifin Noor. 1990. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : Pustaka Setia.
- Ary. H. gunawan. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bimo Walgito. 1980. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta : PT. Andi Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Edi Suharto. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan-STKS.
- Edi Suharto. *Pendampingan Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin : Konsepsi Dan Strategi*. di akses 10 Agustus 2010. [http://www.policy.hu/suharto/modul\\_a/makindo\\_32.htm](http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_32.htm)
- Elly M. Setiadi dkk. edisi kedua 2006. *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- Hartomo dan Amicun Aziz. Cetakan VII, 2008. *Ilmu sosial Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Holid Narbuka. 1989. *Pedoman Praktis Membuat Proposal Penelitian*. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo,
- Host Smut. 2009. *Memahami Kemiskinan Dan solusi menuntaskan Kemiskinan*. <http://www.tempatebo.co.cc/>
- Host Smut. *Memahami Kemiskinan Dan solusi menuntaskan Kemiskinan*. <http://www.tempatebo.co.cc/2009/03/memahami-kemiskinan-dan-solusi.html>

Ibnu Hajar. 1999. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta : Grafindo Persada.

Koentjoroningrat. 1980. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta : Aksara Baru.

Koentjoroningrat. 1981. *Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia.

*Kriteria dan Batasan Orang Miskin Di Indonesia*. 2010.  
<http://gemaniasbarat.wordpress.com/>

M Zainuddin. 2008. *Reformasi Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

M, Arifin nor. 1999. *Ilmu Sosial Dasar*. Bandung : Pustaka Setia.

Mencoba Memahami PP No. 48 Tahun 2008 Tentang Biaya Pendidikan.  
<http://mediapendidikan1.blogspot.com/>

*Menghilangkan Kemiskinan*. 2010. <http://id.wikipedia.org/>

Moh Rosyid. 2006. *Ketimpangan Pendidikan*. Kudus : STAIN Kudus Press.

Muhammad Zamroni. 2010. *Pendidikan Wajib Belajar 9 Tahun*.  
<http://www.dradio1034fm.or.id/>

Nanang Martono. 2010. *Pendidikan Bukan Tanpa Masalah : Mengungkap Problematika Pendidikan Dan Perspektif Sosiologi*. Yogyakarta : Gava Media.

Pendidikan dan Kebudayaan. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

*Penyebab Kemiskinan*. 2010. <http://id.wikipedia.org/wiki/Kemiskinan>


Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang *Wajib Belajar*. <http://pp-no-47-tahun-2008.blogspot.com/>

Rahmad Setiadi. *Kemiskinan*. 2010. <http://www.mail-archive.com/>

Saiful Anwar. 1990. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Rineka Cipta.

Sawitri. 2010. *Fenomena Sekolah Gratis*. <http://sekolah-dasar.blogspot.com/>

Suhaeli. 2009. *Banyak Orang Salah Persepsi Soal Program Sekolah Gratis*.  
<http://bataviase.co.id/>



Suharsimi Arikunto. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.

Suharto. 2004. Makalah Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial di Indonesia: Kecenderungan dan Isu. Bandung : Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial.

Sutarno NS. 2003. *Perpustakaan dan Masyarakat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia,

Sutrisno Hadi. 1997. *Metodologi Research*. Yogyakarta : Andi Offset.

Syamsiah Badruddin. "Menyorot Political Will, Political Commitment Dan Political Action Terhadap Pendidikan gratis Dan Pembatasan Anak Usia Sekolah", *Makalah Seminar Nasional Pendidikan Gratis*, 19 Maret 2009

Utomo Dananjaya. 2005. *Sekolah Gratis*. Jakarta : Paramdina

UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Semarang : CV Aneka Ilmu.

W. J. S. Poerwadarminta. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Wahyu MS. 1986. *Wawasan Ilmu Sosial*. Surabaya : Usana Offset Printing.

Yusuf Miarso. 2005. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana.



## PANDUAN WAWANCARA

### 1. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Jabatan :

Hari/Tgl :

Tempat Wawancara :

### 2. Tujuan

Untuk mengetahui persepsi masyarakat miskin terhadap biaya pendidikan setelah adanya pendidikan gratis.

### 3. Pertanyaan

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap program pendidikan gratis?
2. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap biaya pendidikan sebelum adanya pendidikan gratis?
3. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap biaya pendidikan setelah adanya pendidikan gratis?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terhadap biaya SPP setelah adanya pendidikan gratis?
5. Bagaimana dengan pembelian seragam sekolah dan perlengkapannya setelah adanya program pendidikan gratis?
6. Bagaimana dengan uang saku anak bapak/ibu setelah adanya program pendidikan gratis?



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG  
KECAMATAN BANDAR  
DESA TUMBREP

Alamat : Jl. Raya Bandar – Blado Km. 4 Kode Pos 51254

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 335 /SKD. / XI. / 2010

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : ISROK  
b. Jabatan : Sekretaris Desa

dengan ini menerangkan bahwa :

- a. Nama : TARUCHIN  
b. Tempat/Tgl. Lahir : Batang, 13. Mei 1985  
c. Kebangsaan : Indonesia  
d. Agama : Islam  
e. Pekerjaan : Mahasiswa  
f. Alamat : Dukuh Cepoko RT004. RW. 02.

Desa Tumbrep Kecamatan Bandar Kabupaten Batang

Bahwa orang tersebut diatas telah melaksanakan penelitian  
terhadap Masyarakat Miskin dengan judul PERSEPSI MASYARAKAT  
MISKIN TERHADAP PENDIDIKAN GRATIS

2. Berhubungan dengan maksud yang bersangkutan, dimohon agar instansi yang terkait dapat memberikan bantuan serta fasilitas seperlunya.  
3. Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tumbrep 3. November 2010



Tembusan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

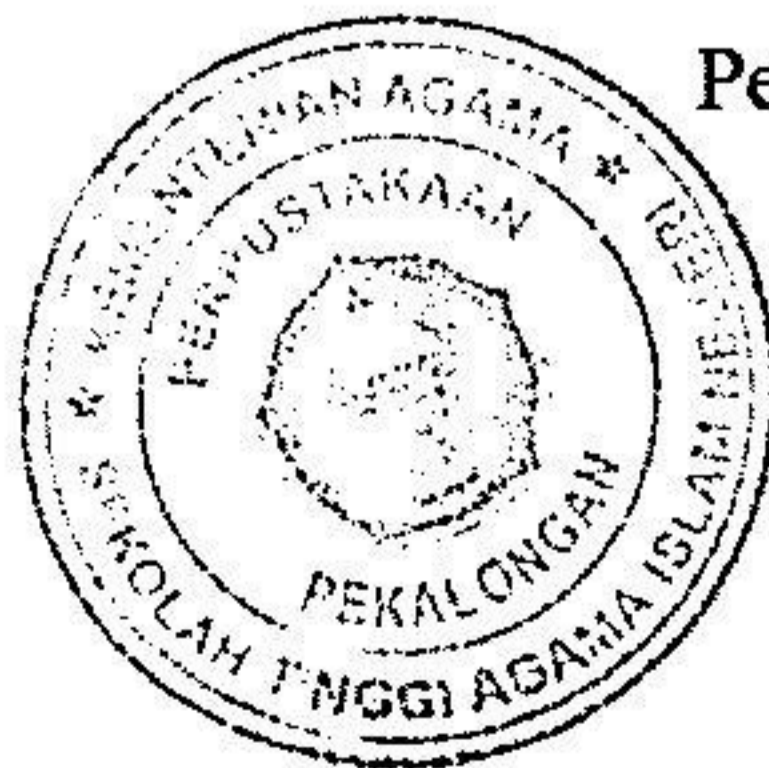
1. Nama Lengkap : Taruchin
2. Jenis Kelamin : Laki-laki
3. Tempat/ Tanggal Lahir : Batang, 13 Mei 1985
4. Agama : Islam
5. Alamat : Cepoko-Tumbrep, Bandar-Batang
6. Nomor telepon/ HP : 085742239000

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Turahim
2. Nama Ibu : Suparti
3. Pekerjaan Ayah : Tani
4. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
7. Alamat Orang Tua : Cepoko-Tumbrep, Bandar-Batang

### C. Riwayat Pendidikan

1. SDN 01 Tumbrep : 1992 – 1998
2. MTs At-Taqwa Bandar : 1998 – 2001
3. SMAN 01 Bandar : 2001 – 2004
4. STAIN Pekalongan : 2006 – 2010



Pekalongan, Nopember 2010

Yang Menyatakan

**Taruchin**  
NIM. 232 06 222